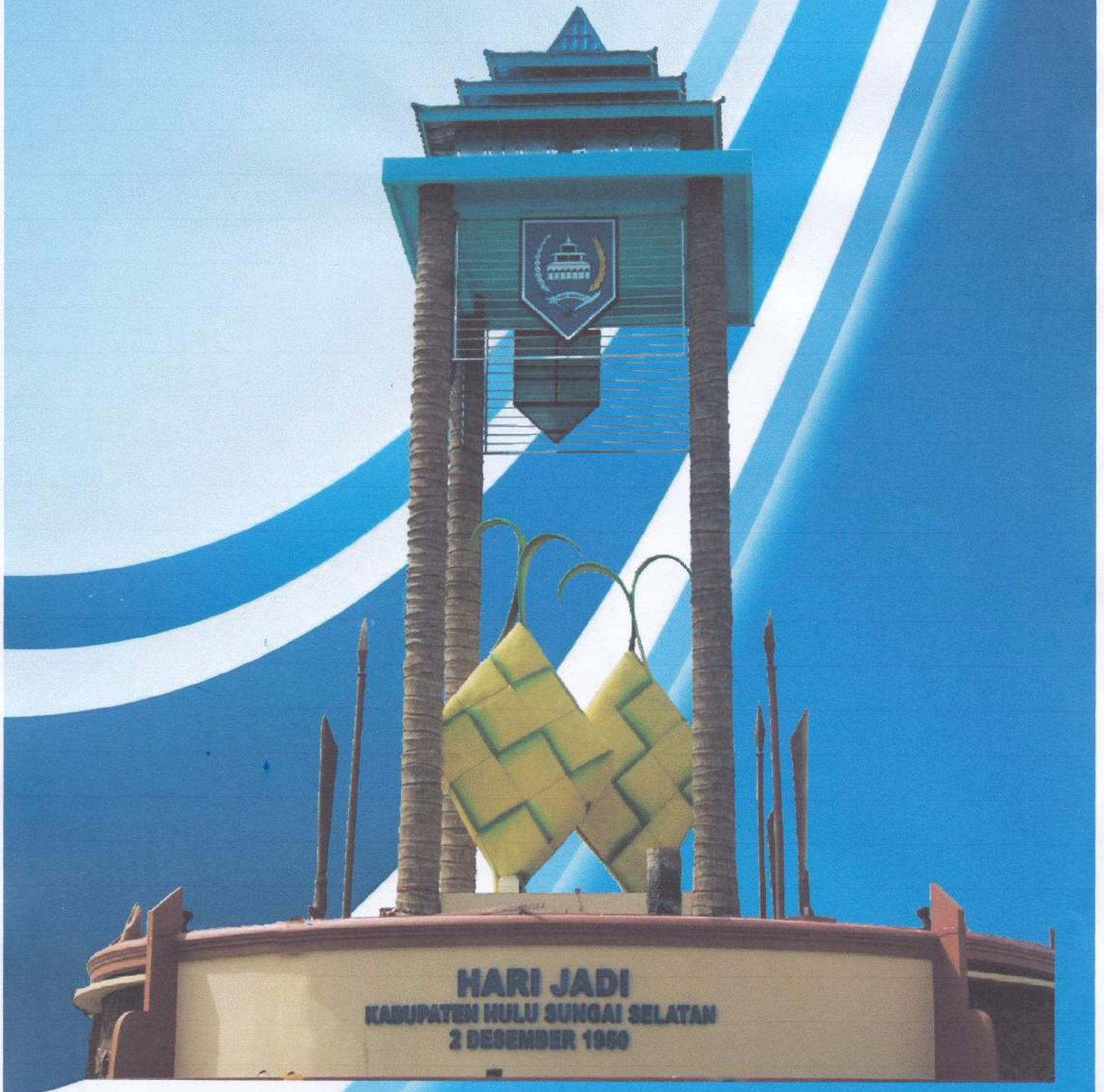


**RENCANA KERJA (RENJA) SKPD
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2020**



KATA PENGANTAR

Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunan berpedoman pada kepada RKPД Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2020 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 Dinas Perhubungan dapat diselesaikan. Renja berfungsi sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh komponen Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan Program/Kegiatan, guna mendukung Visi Kabupaten Menuju Kabupaten HSS Yang Cerdas, Inovatif, Teknologi dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dan penyelesaian Dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020.

Kandangan, Mei 2019.

Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Drs. SASMI RIFANI, M. AP.

Pembina Utama Muda

NIP. 19611016 198503 1 007

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	4
1.2 LANDASAN HUKUM	5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUB TAHUN LALU	
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUB TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DISHUB	8
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DISHUB	13
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DISHUB	12
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	14
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	14
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	16
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DISHUB	17
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	19
BAB IV PENUTUP	21
LAMPIRAN	
- RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	

DAFTAR TABEL

	Hal
TABEL 2.1	
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV.....	9
TABEL 2.2	
CAPAIAN KINERJA DISHUB KAB. HSS TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV.....	12
TABEL 2.3	
ISU STRATEGIS DISHUB BERDASARKAN TUPOKSI	15
TABEL 3.1	
PENJABARAN VISI, MISI DAN TUJUAN DISHUB KAB. HSS.....	18
TABEL 3.2	
URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN DISHUB KAB. HSS TAHUN 2020	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintah Daerah Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau sesuai Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun kembali Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan, dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang berkembang serta memperkirakan keadaan masa yang akan datang, sehingga dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu *“Menuju Kabupaten HSS Yang Cerdas, Inovatif, Teknologi dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat ”*

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap SKPD untuk memiliki Rencana Kerja (Renja – SKPD) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) . Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas
2. Perencanaan Pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
 - c. Rencana Pembangunan Tahunan (RPT).

Rencana Pembangunan Tahunan untuk kabupaten/kota disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat

langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004).

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 150 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya pada pasal 151 ayat (1) dinyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk rencana kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun Renja-SKPD.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 137 ayat (1) menyatakan bahwa SKPD menyusun Renja SKPD.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 11

7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi arah kebijakan keuangan, strategi kebijakan dan sasaran strategis selama tahun 2020 dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2020.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2020 adalah sebagai acuan Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten HSS sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian RPJMD Kabupaten HSS.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- C. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUB TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DISHUB Tahun Lalu (Tahun 2018) dan Capaian Renstra DISHUB

Di tahun 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten HSS akan melaksanakan 8 program dengan 38 Kegiatan. Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk pencapaian program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1

Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2018 Sampai Dengan Triwulan IV

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
			4	5				
2 Terkendalinya emacetan lalu lintas	3 Persentase aspek penyebab kemacetan yang teratasi.	4 100%	5 s.d Triwulan IV	6 100%	7 Program pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	8 Kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan APILL	9 334.900.000,-	10 334.104.000,-
Terwujudnya sarana angkutan umum yang aman	3 Kecepatan rata-rata tempuh kendaraan di jalan protokol pada saat jam sibuk.	4 40 km/jam	5 s.d Triwulan IV	6 40 km/jam	7 Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	8 Kegiatan rehabilitasi pemeliharaan terminal / pelabuhan / Halte	9 103.950.000,-	10 101.885.000,-
Terwujudnya sarana angkutan umum yang aman	3 Persentase angkutan umum yang laik jalan	4 100%	5 s.d Triwulan IV	6 87,71%	7 Program peningkatan pelayanan angkutan	8 Kegiatan sosialisasi peraturan lalu lintas darat	9 15.725.000,-	10 15.700.000,-
Terwujudnya sarana angkutan umum yang aman	3 Persentase pengemudi angkutan sesuai dengan kendaraannya	4 100%	5 s.d Triwulan IV	6 87,71%	7 Program peningkatan pelayanan angkutan	8 Kegiatan fasilitas transportasi jemaah haji	9 247.100.000,-	10 243.200.000,-

Meningkatkan pendapatan retribusi pada urusan perhubungan	yang memiliki SIM sesuai dengan kendaraannya	-7,94%	s.d Triwulan IV	1,77%	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Kegiatan pemeliharaan APILL dan rambu-rambu lalu lintas	55.000.000,-	55.000.000,-
	Persentase penurunan pelanggaran angkutan umum di jalan				Program pengendalian dan pengawas Lalu Lintas Jalan	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	88.050.000,-	86.670.000,-
					Program peningkatan pelayanan angkutan	Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian umum	27.500.000,-	27.300.000,-
					Program peningkatan pelayanan angkutan	Kegiatan pengawasan dan pengendalian perparkiran	12.000.000,-	12.000.000,-
					Program peningkatan pelayanan angkutan	Kegiatan pengawasan dan pengendalian perparkiran	12.000.000,-	12.000.000,-
					Program peningkatan pelayanan angkutan	Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian umum	27.500.000,-	27.300.000,-
					Program peningkatan pelayanan angkutan	Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian umum	27.500.000,-	27.300.000,-
					Program peningkatan pelayanan angkutan	Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian umum	27.500.000,-	27.300.000,-
					Program peningkatan pelayanan angkutan	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan	296.945.000,-	276.518.000,-

Terwujudnya sarana angkutan sungai dan danau yang laik layar	Persentase angkutan sungai dan danau yang laik layar	100%	s.d Triwulan IV	100%	Program peningkatan pelayanan angkutan	penumpang	Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana angkutan sungai dan danau	-	-
	Persentase pengemudi angkutan sungai dan danau yang memiliki Surat Keterangan Kecakapan (SKK)	100%	s.d Triwulan IV	100%	Program pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Kegiatan sosialisasi peraturan lalu lintas sungai dan danau	12.025.000,-	12.025.000,-	
	Persentase penurunan pelanggaran angkutan sungai dan danau di jalan	50%	s.d Triwulan IV	50%	Program pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Kegiatan pengendalian dan Pengawasan Lalu lintas sungai dan danau	16.740.000,-	16.740.000,-	
	Meningkatnya kapasitas kinerja dan pelayanan publik pada Dinas Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	82,33	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Kegiatan pembangunan dermaga.	985.510.000,-	915.122.000,-	
					Program rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ	Kegiatan pemeliharaan rambu lalu lintas sungai dan danau	6.000.000,-	6.000.000,-	
			s.d Triwulan IV		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	111.100.000,-	110.727.000,-	
					Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	101.150.000,-	100.457.500,-	
					Program pelayanan	Kegiatan penyediaan	26.900.000,-	26.443.000,-	

Kab.HSS	Informasi/ keluhan masyarakat yang ditindak lanjuti	100%	s.d Triwulan IV	100%	administrasi perkantoran	jasa perbaikan peralatan kerja	2.500.000,-	2.499.850,-
	Prediksi nilai evaluasi AKIP	B	s.d Triwulan IV	BB	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		
	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektora t yang ditindaklanjuti	100%	s.d Triwulan IV	100%				

Sedangkan capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai triwulan IV tahun 2018 secara ringkas dapat dilihat dalam table 2.2 berikut

Tabel 2.2
Capaian Kinerja DISHUB KAB. HSS Tahun 2018
s.d Triwulan IV

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI CAPAIAN KINERJA	
				5	6
1	Terkendalinya kemacetan lalu lintas	Persentase aspek penyebab kemacetan yang teratasi.	100%	s.d Triwulan IV	100%
		Kecepatan rata-rata tempuh kendaraan di jalan tatisti pada saat jam sibuk.	40 km/jam	s.d Triwulan IV	40 km/jam
2	Terwujudnya sarana angkutan umum yang aman	Persentase angkutan umum yang laik jalan	100%	s.d Triwulan IV	87,71%
		Persentase pengemudi angkutan sesuai dengan kendaraannya yang memiliki SIM sesuai dengan kendaraannya	100%	s.d Triwulan IV	87,71%
		Persentase penurunan pelanggaran angkutan umum di jalan	-7,94%	s.d Triwulan IV	1,77%
3	Meningkatnya pendapatan retribusi pada urusan perhubungan	Persentase pendapatan tatis umum	100%	s.d Triwulan IV	122,46%
		Persentase pendapatan retribusi terminal	100%	s.d Triwulan IV	110,33%
		Persentase pendapatan retribusi pelayanan pelabuhan	100%	s.d Triwulan IV	137,72%
		Persentase pendapatan retribusi PKB	100%	s.d Triwulan IV	83,44%
4	Terwujudnya sarana angkutan sungai dan danau yang laik layar	Persentase angkutan sungai dan danau yang laik layar	100%	s.d Triwulan IV	100%
		Persentase pengemudi angkutan sungai dan danau yang memiliki Surat Keterangan Kecakapan (SKK)	100%	s.d Triwulan IV	100%

		pelanggaran angkutan sungai dan danau di jalan			
5	Meningkatnya kapasitas kinerja dan pelayanan tatis pada Dinas Perhubungan Kab.HSS	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	s.d Triwulan IV	82,33
		Persentase informasi/ keluhan masyarakat yang ditindak lanjuti	100%	s.d Triwulan IV	100%
		Prediksi nilai evaluasi AKIP	B	s.d Triwulan IV	BB
		Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	s.d Triwulan IV	100%

3.4 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan Triwulan IV tahun 2018 telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Untuk mencapai pelayanan yang optimal, pemerintah daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan azas-azas pemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai dengan aturan umum penyelenggaraan Negara.

Tugas, fungsi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertuang dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai 2 bidang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, seperti tergambar pada gambar 2.1 di bawah ini :

Gambar 2.1
Pembagian Bidang DISHUB Kab. HSS



2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 61 Tahun 2016 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta tatis-faktor yang mempengaruhinya. Isu-isu strategis Dinas Perhubungan berdasarkan tupoksinya dapat disajikan pada tati berikut :

Tabel 2.3

Isu Strategis DISHUB Berdasarkan Tupoksi

Tugas Pokok	Fungsi	Isu Strategis
Melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang lalu lintas angkutan jalan dan lalu lintas angkutan sungai dan danau serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.	Penyusunan kebijakan teknis urusan Pemerintahan di bidang lalu lintas angkutan jalan dan lalu lintas angkutan sungai dan danau	Sering terjadi Kemacetan lalu lintas.
		Peningkatan pendapatan retribusi pada urusan perhubungan
		Sarana angkutan sungai dan danau yang aman
		Belum optimalnya pelayanan, kualitas kelembagaan dan

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2020 terdapat perbedaan dengan rancangan di tahun 2018 terdapat yaitu perampingan pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan menjadi 7 kegiatan, serta penyesuaian pada nama program dan kegiatan.

2.5. PENELAHAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di awal tahun 2019 dimana usulan masyarakat dapat ditampung melalui Musrenbang Kecamatan, ada beberapa usulan terkait program dan kegiatan yang menyangkut tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan :

1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas di Kandangan Utara Kec. Kandangan
2. Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) di Desa Wasah Hulu Kec. Simpur
3. Pengadaan marka jalan
4. Pembangunan/rehabilitasi dermaga di Desa Bayanan Kec. Daha Barat.
5. Pengadaan kapal penyeberangan di Desa Baru Kec. Daha Barat
6. Pengadaan kapal cepat/speed boat di Desa Bajayau Kec. Daha Barat
7. Pembangunan lahan parkir di Desa Taniran Kubah Kec. Angkinang.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sebagai Pembantu Bupati Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan salah satu Urusan Wajib Non SPM yaitu Urusan Perhubungan, dimana secara Teknis Fungsional berada dibawah binaan Pemerintah Pusat yang dalam hal Ini Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan selaku Wakil Pemerintah Pusat Didarah dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Propinsi Kalsel, yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementrian Perhubungan RI.

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan Program dan Kegiatan dari Pemerintah Pusat diarahkan dan dipadukan dengan Kebijakan Daerah guna mengatasi berbagai isu-isu strategis yang berkaitan dengan situasi yang berkembang di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang harus diantisipasi dan diatasi dengan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN HSS

Isu strategis yang diangkat oleh Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Masih banyaknya angkutan jalan umum yang belum memenuhi persyaratan keselamatan.
2. Masih banyaknya angkutan sungai dan danau yang belum memenuhi persyaratan keselamatan.
3. Belum optimalnya pelayanan, kualitas kelembagaan dan sumber daya aparatur.

Berdasarkan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berikut penjabaran misi, tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tabel 3.1
Penjabaran visi, misi dan tujuan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

MISI	TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastuktur fisik, ekonomi dan tatis yang menunjang tatis perekonomian	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi dan tatis yang berkualitas	Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana penunjang perekonomian yang berkualitas
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi dalam kehidupan yang agamis	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah
	Membangun Citra Positif Pemkab Kabupaten HSS	Membangun Citra Positif Pemkab Kabupaten HSS
	Meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan statistik dan persandian	Meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan statistik dan persandian
	Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik

3.3 Program dan Kegiatan

Kebijakan pembangunan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah. Sementara kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2020 merupakan pelaksanaan operasional tahun kedua dari Renstra Dinas Perhubungan tahun 2018 – 2023 dan disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020. Hal tersebut tertuang dalam table 3.2 berikut :

Tabel 3.2

**Uraian Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020**

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	(2)	(5)	(6)	(7)
Non Urusan				
Sekretariat				
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	83 nilai	886.303.500	
1	Kegiatan penyediaan jasa dan administrasi kantor	1 tahun	66.575.000	Pendapatan Daerah
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun	80.400.000	Pendapatan Daerah
3	Penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD	1 tahun	19.000.000	Pendapatan Daerah
4	Penyediaan makanan dan minuman	1 tahun	23.770.000	Pendapatan Daerah
5	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya	1 tahun	355.650.000	Pendapatan Daerah
6	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan lapangan	1 tahun	340.908.500	Pendapatan Daerah
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	83 nilai	208.813.400	
1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan	1 tahun	38.793.400	Pendapatan

3	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	35.520.000	Pendapatan Daerah
C	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	9.621.000	
1	Penyusunan Dokumen Keuangan	12 dokumen;	4.825.000	Pendapatan Daerah
2	Penyusunan Dokumen AKIP	15 dokumen	4.796.000	Pendapatan Daerah
D	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	82 nilai	320.200.000	
1	Pelayanan kinerja perangkat daerah	1 tahun	298.650.000	Pendapatan Daerah
2	Abdi yasa teladan	1 kegiatan	21.550.000	Pendapatan Daerah
Wajib				
Lalu Lintas Angkutan Jalan				
E	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	100%	1.119.140.000	
1	Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	1.391 buah	425.600.000	Pendapatan Daerah
2	Pengadaan dan pemeliharaan rambu lalu lintas	1 tahun	370.400.000	Pendapatan Daerah
3	Pemeliharaan APILL	14 buah	76.000.000	Pendapatan Daerah
4	Penyelenggaraan moda angkutan darat	1 tahun	191.700.000	Pendapatan Daerah
5	Bimbingan teknis transportasi publik	2 kegiatan	55.440.000	Pendapatan Daerah
Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau				
F	Program Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau	100%	485.320.000	
1	Penyelenggaraan moda angkutan sungai	1 tahun	485.320.000	Pendapatan Daerah
			3.029.397.900	

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2020 disusun sebagai pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dokumen Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan dapat memberi umpan balik yang positif dalam pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2020 bagi para pemimpin manajemen dan seluruh staf Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa mendatang sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah terhadap upaya pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat.

Kandangan, Mei 2019

Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Drs. SASMI RIFANI, M. AP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611016 198503 1 007

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Peningkatan Perencanaan, Peleporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen keuangan daerah; Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP	100 %;79 Nilai	9.621.000		100 %;79 Nilai	
Penyusunan Dokumen Keuangan	SKPD	Laporan keuangan yang memenuhi aspek kualitas	5 Dokumen	4.825.000	Pendapatan Daerah	5 Dokumen	4.825.000
Penyusunan Dokumen AKIP	SKPD	Dokumen AKIP memenuhi aspek kualitas	9 Dokumen	4.796.000	Pendapatan Daerah	9 Dokumen	4.796.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks kepuasan pelayanan	83 Nilai	886.303.500		84 Nilai	
Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	66.575.000	Pendapatan Daerah	1 Tahun	65.825.000
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	80.400.000	Pendapatan Daerah	1 Tahun	80.400.000
Penyediaan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi KPD	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	19.000.000	Pendapatan Daerah	1 Tahun	14.000.000
Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	23.770.000	Pendapatan Daerah	1 Tahun	28.620.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	355.650.000	Pendapatan Daerah	1 Tahun	373.650.000
Apak Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	340.908.500	Pendapatan Daerah	1 Tahun	340.908.500
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Indeks kepuasan pelayanan	83 Nilai	208.813.400		84 Nilai	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Peralatan dan perlengkapan kantor berfungsi dengan baik	1 Tahun	38.793.400	Pendapatan Daerah	1 Tahun	68.193.400
Peneliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Peralatan, perlengkapan mobil serta kendaraan operasional kondisi baik	1 Tahun	134.500.000	Pendapatan Daerah	1 Tahun	139.500.000
Peneliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Peralatan dan perlengkapan kantor kondisi baik	1 Tahun	35.520.000	Pendapatan Daerah	1 Tahun	28.600.000
Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah		Indeks kepuasan pelayanan	83 Nilai	320.200.000		84 Nilai	
Pelayanan penyelenggaraan haji daerah	Kabupaten	Pelayanan perangkat daerah sesuai standar dan ketentuan	1 Tahun	298.650.000	Pendapatan Daerah	1 Tahun	312.350.000
Penyediaan sarana dan prasarana haji daerah	SKPD	Pelaksanaan program Kementerian Perhubungan	1 kegiatan	21.550.000	Pendapatan Daerah	1 kegiatan	24.100.000

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas angkutan Jalan	Persentase aspek penyebab kemacetan yang teratasi; Persentase angkutan umum yang laik jalan	100 %;90 %	1.119.140.000	100 %;94 %	
Kandungan	Jumlah angkutan umum yang laik jalan	1 Tahun	425.600.000	1 Tahun	418.144.000
Kabupaten	Rambu-rambu lalu lintas dalam kondisi baik	1 Tahun	370.400.000	1 Tahun	409.400.000
SKPD	APILL dalam kondisi baik	14 Buah	76.000.000	14 Buah	76.000.000
SKPD	Bus sekolah dalam kondisi baik	1 Tahun	191.700.000	1 Tahun	227.700.000
SKPD	Terlaksananya program Kementerian perhubungan	3 Kegiatan	55.440.000	3 Kegiatan	55.440.000
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas angkutan Sungai dan Danau	Persentase angkutan sungai dan danau yang laik layar	70%	485.320.000	80%	
SKPD	Kapal penyeberangan dalam kondisi baik	1 Tahun	485.320.000	1 Tahun	232.720.000
TOTAL			3.029.397.900		2.905.171.900

Kandangin, Mei 2019
Pit. KEPALA DINAS,



Drs. SASMI RIFANI, M. AP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611016 198503 1 007